



Religious Diversity and Philanthropy in Social Work Practices: Intervention Capital in Empowerment

Imam Alfi ¹*, Umi Halwati ²

¹ Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto)

² Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto

* Corresponding Author. E-mail: cita47@gmail.com

Received: 31 Jan 2021; Revised: 7 Juni 2021; Accepted: 23 Des 2021

Abstract: This article focuses on how philanthropy and religious diversity become capital in the practice of social work. Qualitative research with a library research approach was used in this study. Data and information were carried out by searching libraries, books, documentation, journals or research results related to the object of research. Data analysis uses content analysis. This study found that religion is not only seen as an-sich doctrine, but as a social process so that it can reduce ideological clashes so as to create a harmonious life. Result also found that religious diversity as a national asset must be treated and preserved in humanitarian work. Religious diversity can be found through the social philanthropy movement for humanitarian programs. Through the philanthropic movement part of the capital in the intervention process. Community participation in a sustainable, targeted and organized manner is a meeting point. Thus, empowerment through the capital of religious pluralism and philanthropy can encourage a more just society's welfare.

Keywords: Philanthropy, religious diversity, empowerment, social work intervention

PENDAHULUAN

Profesi pekerjaan social dikenal dengan praktek kedermawanan social melalui proses pertolongan yang tidak membeda-bedakan kedudukan manusia. Indonesia sebagai suatu bangsa memiliki masyarakat yang beragam (*plural*) baik secara horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal, terlihat dari adanya perbedaan ras, suku bangsa, budaya dan agama (Pedersen, 2016). Secara vertikal, adanya perbedaan strata sosial berdasarkan faktor ekonomi dan politik. Secara umum, konsekuensi dari masyarakat majemuk adalah konflik sosial. Sikap yang dapat menstimulan konflik horizontal adalah eksklusifisme, primordialisme kesukuan, ras dan agama. Dalam melakukan kerja-kerja kemanusiaan Pekerjaan Sosial mengandung prinsip keragaman dalam melintasi batas sektoral, ras, etnis kelompok dan keragaman agama (Akintayo et al., 2018).



Permasalahan dilapangan banyak stigma dimasyarakat dalam melaksanakan kerja kemanusiaan tersekat dan terhalang oleh sikap sempit dalam merespon keragaman agama. Hal ini juga disinggung Syamsuddin bahwa ada beberapa faktor penyebab ternyadinya konflik sosial yang salah satunya berasal dari faktor agama dan politik identitas agama (Syamsuddin, 2020). Hal ini disalah satunya juga disebabkan atas ketidakmampuan menerjemahkan pesan wahyu sehingga memiliki interpretasi makna yang cenderung sempit dan berbenturan (St. Aisyah BM, 2014). Hal ini dampak pada tujuan utama dalam membantu manusia ke arah lebih mandiri, kuat, berdaya sering terabaikan. Salah satu yang menarik dan menjadi wacana adalah seputar filantropi atau kedermawanan sosial yang dipertemukan ditengah keragaman agama (Jahidin, 2016).

Kedermawanan sosial atau dikenal dengan filantropi merupakan tindakan seseorang mencintai sesama manusia, dalam artian peduli pada kondisi manusia yang lainnya dan menyayanginya, sehingga merasa bertanggung jawab jika orang lain kondisinya tidak baik (Tamim, 2011). Jika dilihat sejarahnya filantropi berasal dari Yunani kuno yang awalnya berangkat dari sikap atas kebebasan manusia. Sikap cinta kasih ini mewujud dalam bentuk relasi si-kaya dan si-miskin, yang mendorong terciptanya kemaslahatan, public good, dan kesejahteraan bersama. Gerakan filantropi berkembangan menjadi beragam tidak hanya pada sector pemberian barang, uang ataupun finansial yang lain, tetapi praktik filantropi juga berkembangan kearah kepedulian dan pemberian cinta kasih, empati, dukungan emosional dan proses pertolongan lainnya (Puji Purwatiningsih & Hermawan Adinugraha, 2018). Hal ini terlepas dari perdebatan bahwa keberadaan filantropi sejak manusia lahir, memberikan cinta kasih, peduli sesama, simpati dan pemberian materi ataupun non materi kepada orang lain merupakan watak alami (*fitrah*) manusia yang dijunjung tinggi dan menjadi identitas kemanusian (*humanis*) (Saripudin, 2016).

Disamping tindakan filantropi didasarkan atas “*fitrah*” manusia itu sendiri. Filantropi juga memiliki titik temu yang jelas dengan ajaran/doktrin agama. Baik agama *samawi* (Islam, Kristen, Yahudi) ataupun bukan *sawawi* keduanya memiliki ajaran/doktrin yang bisa dipertemukan dalam satu jalan yaitu “filantropi” dimana agama mengajarkan tentang tindakan dan sikap peduli untuk memberi atas dasar cinta kasih. Selanjutnya, seseorang memberi sesuatu tidak hanya atas dasar empati dan cinta kasih *an-sich*, tetapi juga atas dasar agama (agama) yang diyakininya sebagai manifestasi amal dengan orientasi pahala saja. Sikap beragama demikian bahkan menjadi tolak ukur kualitas keagamaan (iman)

dan kesalihan sosial. Berangkat dari dua motif yakni fitrah dan agama filantropi semakin berkembang. Terlebih di negara yang memiliki keragaman sosial dan agama seperti Indonesia. filantropi menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan social (Abu bakar, 2005).

Perspektif pluralism agama dalam masyarakat merupakan bagian dari hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan dilingkungan masyarakat, hal tersebut merupakan kuasa Illahiah (sunatullah) (Muhammad, 2014). Pluralism dalam masyarakat merupakan bagian dari khasanah kekayaan dalam kehidupan social yang dinamis, walaupun dilain hal dapat menjadikan potensi perpecahan diantara masyarakat.

Keragaman agama harus dikelola sebagai aset bangsa sekaligus titik temu dalam rangka pembangunan dan pelaksanaan kesejahteraan sosial. Sebagai bagian dari suatu institusi yang dianut oleh setiap individu (Ali, 1971), agama dalam kehidupan social sejatinya mampu menjadi alat dalam rangka mempersatukan aspirasi dan potensi masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai panduan-panduan yang terdapat didalam ajaran agama untuk melalui nilai moral yang diajarkan dan diamalkan oleh masing-masing pemeluknya. Atas hal tersebut masyarakat bisa terdorong untuk menjadikan sistem kehidupan masyarakat yang terpadu dan utuh. (Solatun, 2008).

Setiap agama mengajarkan doktrinnya saja yang eksklusif, superior dan yang paling benar, hal ini mengundang kontroversi hebat. Ketika kenyataan pluralism agama tidak bisa dielakkan, maka melalui kontek tersebut apa dan bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan harmonis bagi setiap umat manusia dengan beragam kepercayaan agama. Dari kondisi tersebut di atas, maka dibutuhkan sikap yang tepat dalam menghadapi keragaman tersebut. Khususnya tentang bagaimana Gerakan filantropi dan keragaman tersebut justru menjadi aset dan penunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial dalam praktek pekerjaan social melalui proses pemberdayaan, kemandirian dan partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan kajian tentang kontek tema penelitian ini, peneliti telah melakukan dan menerapkan model penelitian sebagai bagian kajian ilmiah untuk bisa pertanggung jawabkan. Dalam kontek ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui jenis studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji tema yang berhubungan dengan konsep agama-agama mengenai keragaman (*diversity*) dalam berbagai perspektif agama Islam, Kristen dan Hindu. Kemudian dianalisis

dalam kedalam kontek pluralism dan filantropi sesuai dengan kajian yang dibahas. Dalam mendapatkan data-data melalui penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui dua hal yakni dokumentasi dan observasi. Dokumentasi diperoleh melalui berbagai sumber-sumber penelitian terdahulu yakni dari jurnal, buku, dan laporan penelitian lainnya. Sedangkan observasi dilakukan sebagai data tambahan untuk melakukan analisis sesuai dengan kontek dan tema yang dikaji. Teknik observasi digunakan melalui model non-partisipasi, dengan mengamati lingkungan masyarakat di dalam kehidupan sosial peneliti. Analisis data menggunakan *content analysis* yaitu penarikan kesimpulan dari data yang sudah diperoleh dengan cara menemukan pesan inti dari teori secara objektif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pluralisme Agama Sebagai Aset Bangsa

Konsep tentang pluralism tidak hanya menunjuk adanya kenyataan kemajemukan, tetapi disisi lain juga tidak mengelakkan adanya berbagai pengikut agama dan hak agama lain. Disamping itu juga kita juga dituntut untuk bisa terlibat melalui berbagai upaya untuk memahami berbagai perbedaan sekaligus persamaan akan bisa tercapai kehidupan yang rukun dan damai dalam kebinekaan. (Shihab, 1999). Pluralisme berbeda dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme adalah suatu realita aneka ragam agama, ras dan bangsa hidup dalam satu lokasi (Husaini, 2005).

Konsep pluralisme tidak sama dengan relativisme. Relativis berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut “kebenaran” atau “nilai” ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakatnya. Konsekuensinya, doktrin agama apapun harus dinyatakan benar atau “semua agama adalah sama” karena kebenaran agama-agama walaupun berbeda-beda tetap harus diterima (MUI, 2005). Pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yaitu menciptakan suatu agama atau kepercayaan baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru, misalnya *New Age Religion* terkait perpaduan antara yoga Hindu, meditasi Budha dan tasawuf Islam (Thoha, 2005). Konsep pluralisme agama adalah berinteraksi dengan aneka ragam agama, membuka diri, menghormati agama lain dilandasi komitmen kokoh terhadap agama masing-masing (Rahman, 2014; Shihab, n.d.-b).

Islam dalam pluralism beragama

Islam dalam ajarannya memberikan gambaran yang tergantung dan jelas akan pluralism. Hal ini juga bisa kita pahami melalui prinsip dasar dalam menyukai dan memahami pluralism. Prinsip ini merupakan bagian dari kerangka yang dipakai dalam ajaran islam dalam kontek memahami pluralism. Adapun beberapa prinsip yang harus kita cermati yakni; (Adnan Qohar, 2013)

1. Prinsip keragaman yang terbuka atau inklusivitas relatif. Sikap terbuka dalam mencapai kebenaran ini merupakan makna terdalam dari Islam itu sendiri. Dengan mengambil sikap inklusif, kita dengan anggun bisa memahami keragamaan dan tidak jatuh ke dalam klaim kebenaran dan menyalahkan orang lain.
2. Keadilan objektif. Dalam konteks keberagaman, keadilan mencakup pandangan dan tindakan Islam terhadap pemeluk agama lain. Jangan menggeneralisasi tentang agama hanya karena Anda telah melihat dan menyaksikan beberapa orang melakukan hal-hal buruk. Kemudian generalisasikan dan simpulkan bahwa semua penganut agama itu melakukan hal-hal buruk.
3. Jauhi kekerasan saat berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk dakwah.
4. Jadikan pluralisme agama sebagai kompetisi positif untuk kebaikan. Salah satu hikmah beragam manusia yang berbeda adalah mereka bisa saling mengenal, keragaman ini mendorong orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan terbaik di antara orang-orang dari agama lain.

Dalam pandangan islam bisa kita pahami bahwa pluralitas sesungguhnya bertujuan untuk bisa saling bergandeng tangan dalam kehidupan antar manusia dan alam semesta seisinya. Dijelaskan dalam Ayat Al-Qur'an surat al-Haj ayat 40¹ bisa menjadi pegangan mengenai adanya pluralitas agama. Dalam surat tersebut mempertegas sekaligus menjadi bukti atas sikap santun dan kelapangan terhadap pluralism agama itu sendiri. Hal ini tidak hanya sebagai wacana tetapi dibuktikan melalui tindakan yang ramah dan toleran. Hal ini juga ditegaskan oleh makna Islam itu sendiri, yang berarti ketaatan. Itu berarti ketaatan kepada Sunnatullah. Ketika Anda resmi mengaku sebagai Muslim, sebenarnya Anda selalu berjanji untuk setia dan taat kepada Sunnatullah (Siradj, 2005).

Nurcholis Madjid juga memiliki pandangan terkait pluralism yang menyatakan bahwa pluralism adalah sebuah keniscayaan Tuhan (hukum alam atau “*sunnatullah*”) yang

¹ “Dan sekiranya Allah tiada menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gerja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak dikumandangkan nama Allah”.

tidak akan berubah, sehingga tidak mungkin dilawan (Madjid, 2000). Pluralisme yang memandang suatu sistem nilai secara positif-optimis terhadap kemajemukan itu sendiri, dengan menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan tersebut (Madjid, 1995, 2000).

Model pluralisme yang menuntut komitmen teguh pada semua agama diilustrasikan oleh Nabi dengan kata-kata dan Perbuatan beliau. Konsep penyatuan yang dijalankan oleh Nabi SAW bukan pada kontek menghilangkan perbedaan itu sendiri, tetapi melalui penghormatan. Setiap kelompok memilih jalan dan cara hidupnya sendiri, dan masing-masing harus berjuang untuk hasil yang baik. (Halwati et al., 2018; Shihab, n.d.-a). Ketika Nabi Muhammad SAW memimpin kota Madinah, ada pesan beliau yang menarik yakni siapa yang telah mengganggu ummat lain (pemeluk agama samawi) berararti dia menggangguku(Shihab, n.d.-b). agama tidak dijadikan sebagai legitimasi sebagai agama resmi di Madinah dan tidak memaksakan ummat lain untuk masuk islam seluruhnya. (Kahmad, 2002).

Kristen memandang keberagamaan

Ketika berbicara tentang pluralism agama, masyarakat gereja telah belajar banyak hal dari sejarah masa lalu dan mengambil banyak hikmah untuk bisa dipetik. Sejarah masa lalu gereja telah memberikan makna yang begitu kaya akan ajaran agama untuk dipelajari. Disamping itu banyak inspsirasi dan kekayaan tradisi dimasyarakat juga menjadi modal dalam memahami dan mempelajari akan pluralism agama. Terdapat berbagai pandangan didalam Kristen terhadap ajaran agama lain, yang cukup terkenal yakni pandangan Alan Race dengan memakai kategori eksklusif, inklusif, dan pluralism (Patty, 2007). Ekslusif yakni melihat bahwa ajaran agama lain itu kesalahan atau diistilahkan kegelapan. Orang-orang dari yang mananut ajaran agama lain perlu untuk segera insaf dan tobat. Jika tidak, itu harus diminimalkan atau dihancurkan. Tetapi di luar Kristus (dan orang Kristen), mereka tersesat, mengikuti Setan, dan pergi ke neraka. Sikap eksklusif secara khusus diungkapkan oleh Karl Barth.

Sikap inklusif, yang merupakan kategori komprehensif, telah diadopsi oleh Gereja Katolik. Konsili Vatikan II merupakan kemajuan besar dalam teologi agama Gereja Katolik. Gereja Katolik pernah menjadi gereja-sentris, mengklaim bahwa "tidak ada keselamatan di luar gereja." Dalam perkembangannya, ecclesocentric telah bergeser ke Christocentric. Dan itu melihat Kristus sebagai satu-satunya ukuran keselamatan. Namun, Christocentric di sini berbeda dengan model Christocentric dari Bath. Di sini, Christocentric lebih inklusif. Pada

Konsili Vatikan II, Gereja Katolik menjadi lebih aktif tentang kebenaran dan nilai-nilai agama lain. Karl Rahner meletakkan dasar yang positif bagi Gereja Katolik untuk agama-agama lain. Lerner berpendapat bahwa orang Kristen dapat dan tidak hanya melihat agama lain sebagai "sah" dan "jalan menuju keselamatan". Lerner melihat betapa baik dan penuh kasih sayang orang-orang dari agama lain. Menurut n Lerner, ini adalah "orang-orang Kristen yang tidak disebutkan namanya." Bahkan umat Hindu, Buddha, dan Muslim sebenarnya adalah "Kristen". Bagi Lerner, non-Kristen diselamatkan oleh kehadiran Kristus yang menyamar sebagai agama mereka. Artinya, keselamatan orang lain tidak datang dari agama mereka sendiri, tetapi dari Kristus yang bekerja dalam agama-agama itu.

Para pluralis dalam pandangan Rice menggunakan pendekatan yang lebih teori-sentris. Ada anggapan bahwa semua agama adalah produk dari satu tuhan. Sesuai dengan namanya, kelompok pluralistik ini bersifat pluralistik. Pluralisme adalah fakta. Tidak semua orang di dunia ini adalah orang Kristen, dan tidak semua orang berdiri di bawah "atap suci" orang Kristen. Secara internal, tidak ada kekristenan itu sendiri. Ada pluralisme di dalamnya (Patty, 2007).

Orang Kristen mengatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan teologis pada Tuhan yang benar-benar ingin menyelamatkan segalanya, Tuhan dari "cinta murni yang tak terbatas" yang menerima segalanya dan menginginkan kehidupan dan keselamatan. Tuhan menerima semua orang yang Dia kasih tidak hanya dalam persekutuan di gereja, tetapi diluar itu juga tetap dikasihi. Oleh karena itu, teologi pluralistik mendorong umat beragama untuk menyampaikan dan berbagi kandungan berharga dari agamanya. Agama harus berdialog. Kebenaran masing-masing agama tidak untuk pribadinya sendiri dan mengabaikan agama lain, tetapi perlu diorganisir agar ada proses pembelajaran yang memperdalam kebenaran masing-masing agama. Esensi agama jelas bersifat relasional dan dialogis (Knitter, 2007).

Pluralism agama Menurut Pdt.Kusmo Laharjo menerima kebenaran agama lain. Ini bagian dari fakta nyata bahwa masing-masing dari ajaran agama memiliki kebenaran, cinta dan keadilan tidak sekedar dimiliki sendiri semata. Pdt. Budiono berpendapat bahwa pluralisme adalah paham sekuler yang menganggap semua agama sama. Sebagai contoh, interpretasi manusia dan pemahaman Tuhan berbeda, meskipun mereka semua mengakui satu Tuhan. Pastor Felix Suyatono melihat pluralisme agama sebagai fakta bahwa ada banyak agama. Pdt Nugraha menjelaskan bahwa pluralisme agama menciptakan perbedaan pandangan tentang Tuhan dan cara beribadah kepada Tuhan menurut keyakinan mereka.

Mereka yang beragama Katolik akan menyembah Tuhan seperti yang diyakini oleh iman Katolik, bahkan jika Tuhan tidak benar-benar Katolik. Pastor Felix juga menegaskan bahwa pluralisme agama, khususnya Islam, Kristen, dan Yudaisme, berasal dari keluarga yang sama, yakni Nabi Ibrahim. Agama-agama Ibrahim memiliki dua kesamaan. Satu secara genetik berasal dari garis keturunan yang sama. Yaitu, keturunan Ibrahim dari nasab Ishak Kristen dan Yahudi dan dari nasab Ismael Islam. Kedua, ketiganya memiliki doktrin yang sama, tauhid, sehingga mereka juga memiliki afinitas teologis (monoteisme) (Sumbulah, 2015).

Keberagaman dalam Perspektif Hindu

Ajaran dalam agama Hindu, mendorong kepada umatnya dalam rangka mendorong peningakatan dan menjaga etika. Terdapat 3 hal yang menjadi poin penting yang perlu untuk menjadi penekanan bagi ummatnya dalam rangka untuk selalu dijalankan dikehidupan masyarakat, yakni; “*Rta, Satya dan Dharma*”. *Rta* diartikan aturan moral kehidupan untuk dijalankan selalu. *Satya* itu sendiri yakni mengenai kebenaran-kebenaran yang senantiasa selalu dijalankan. Sedangkan *Dharma* bisa kita maknai sebagai bentuk ajaran Hindu dengan menjunjung tinggi kebenaran itu sendiri. Banyak juga kisah suci lain dalam agama hindu yang terdapat didalam kitab-kitabnya. Diantaranya mengenai kisah tentang cerita esensi-esensinya menjunjung tinggi kebenaran universal missal dalam kitab-kitab suci Tantra dan Purana. Di dalam kesusasteraan Brahmana, dalam kitab Weda, tepatnya dijelaskan dalam Arthavada, mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu berbuat baik (*Stuti*), dan menjauhi perbuatan-perbuatan jelek (*Ninda*) (Sapendi, 2012).

Menurut kitab agama Hindu, dalam Rg. Weda X.191.3-4, juga mengajarkan dan menyatakan bahwa sejatinya semua umat manusia bersaudara. *Vasudaiva Kutumbakam*, semua mahluk adalah bersaudara. Hal ini sebabkan melalui pemahaman dalam agama hindu yakni akan satu asal dan Kembali bagi makhluk dan alam semesta. Melalui hal tersebutlah Sang Hyang Widhi mengajarkan kita ketika hidup untuk selalu dalam kedamaian dan kebahagiaan dengan persaudaraan yang sejati. Yayur Weda, 40.7. “Seseorang yang menganggap seluruh umat manusia memiliki atma yang sama dan dapat melihat semua manusia sebagai saudaranya, orang tersebut tidak terikat dalam ikatan dan bebas dari kesedihan”. Ajaran *vasudhaiva kutumbakam* berasal dari kata *vasudha*, *eva* dan *kutumbakan*. *vasudha* berarti dunia, *eva* merupakan kata penekan yang bermakna benar adanya dan *kutumbakam* berarti keluarga. Dengan demikian ajaran ini bermakna bahwa seluruh dunia ini hanyalah satu keluarga besar. Ini adalah suatu ajaran yang mencoba untuk memberi kita

pemahaman bahwa seluruh umat manusia pada hakikatnya adalah satu keluarga besar (Hatcher, 1994; Sugiarti, 2020).

Selain ajaran *vasudhaiva kutumbakam*, agama Hindu juga mempunyai ajaran *Tri Hita Karana*, atau tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. *Tri hita karana* mengajarkan falsafah hidup yang harmonis dengan Tuhan, Alam sekitar dan sesama manusia. Manusia adalah ciptaan *Hyang Widhi*, sedangkan atman merupakan percikan sinar suci kebesaran *Hyang Widhi* yang menyebabkan hidup. Manusia juga bergantung kepada alam dan lingkungan, sehingga lingkungan harus dijaga dan diperhatikan. Manusia juga makhluk sosial yang selalu memerlukan orang lain demi kelangsungan. Oleh sebab itu, hubungan dengan sesama harus selalu baik dan harmonis. Jika ketiga hubungan ini dapat dijalankan dengan seimbang maka *hita* atau kebahagiaan akan tercapai (Hatcher, 1994)

Pandangan elite Hindu Agung, memandang pluralitas sebagai manifestasi dari *vibhuti* (kemahakuasaan) *Hyang Widhi*. Di balik bermacam-macam maya di jagad raya, ada Realitas yang bersumber dan bermuara pada keesaan-Nya (Mathar, 2005:282). Dalam konteks ini, umat Hindu dituntut mampu memberikan penghargaan, karena pluralitas adalah suatu kenyataan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Beratha et al., 2020).

Kedermawanan Sosial Titik Temu Keragaman Agama

Kedermawanan social (Filantropi) dimulai dari kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap orang disekitarnya untuk memberikan pertolongan baik berupa materi seperti uang, makanan, pakaian dan kebutuhan pokok dasar lainnya ataupun non materi. Mereka melakukan itu semua berdasarkan cinta, empati pada sesama. Tulus hati dilakukan tanpa harapan apapun. Selain atas dasar cinta, mereka juga melakukanya karena motif agama. Artinya doktrin/ajaran agama memang menuntut pemeluk agama untuk berbuat baik dengan memberi bantuan kepada orang lain. Ia lakukan karena semata-mata menjalankan titah yang disembah dan hanya pahala yang diharapkan masuk surge bahagia dan seterusnya.

Dengan fakta sejarah demikian, dapat dijadikan petunjuk bawah dua semangat tersebut yakni “cinta kasih” atas nilai humanis dan “agama” menjadi modal tak ternilai dalam semangat filantropi. keduanya adalah titik temu filantropi dalam keragaman agama bahkan bagi sebuah Negara yang plural dan majemuk seperti Indonesia.

Cinta kasih adalah panggilan hati, dalam konteks agama samawi makna paling dekat cinta kasih adalah “*hanifan*”. *Hanifan* memiliki arti kecenderungan hati kepada kebaikan. *Hanifan* adalah suasana sikap batin/hati yang mengarahkan pada tindakan untuk melakukan kebaikan dan menolak keburukan. Biasa disebut dengan hati nurani. Ketika seseorang melakukan keburukan tanpa diberi tahu maka sebenarnya ia tahu bahwa yang ia lakukan adalah perbuatan buruk. Hati sebenarnya mengatakan “tidak” namun tetap ia lakukan. Perasaan menolak inilah yang disebut dengan” *hanif*”. Begitu pula ketika orang melakukan kejahatan pada orang lain dia sadar dan tahu bahwa perbuatan tersebut adalah tidak baik. Meskipun ia belum menemukan dalil/ayat bersumber dari agama. Orang melakukan kebaikan atau menolak untuk melakukan kejahatan tidak menjadi persoalan sulit karena memang manusia dibekali hati nurani yang hanif yang selalu condong kepada kebaikan.

Dengan pribadi yang *hanif* inilah menjadi modal sekaligus titik temu persoalan pluralitas yang cenderung mengarah pada ego sektoral, resistensi konflik serta dixi negatif lain. Ketika pluralitas menuntut untuk mengakui perbedaan perbedaan kelompok. Bahkan lebih luas lagi memberikan ruang bagi mereka. Maka mencari titik persamaan dari semangat *hanif* adalah solusi alternatif mengatasi potensi masalah yang ditimbulkan dari kemajumkan masyarakat.

Selanjutnya yang kedua adalah Agama. Agama keberadaanya adalah untuk mengatur, memandu, mempedoamni pemeluknya. Setiap agama memiliki kitab suci yang terus dipelajari kandungannya sebagai bekal menjalani hidup di dunia ini. Pembahasan ini fokus pada aspek sosial tidak mengarah sedikitpun kepada aspek teologi. Menurut Dadang Kahmad menjelaskan bahwa ketika agama dilihat dalam persepektif telogis/ideologi maka agama akan terjadi benturan-benturan sosial. Oleh karena itu menurutnya agama harus dilihat sebagai sebuah proses sosial.

Filantropi Untuk Pemberdayaan Inklusif

Inklusif berasal dari kata “*inclusion*” dapat diartikan sebagai mengajak masuk atau mengikutsertakan, lawan dari kata“*exclusion*” artinya memisahkan atau mengeluarkan (Luluk Fikri Zuhriyah, 2007; Windati & Sudarsana, 2020). Terdapat dua tipe yang bisa kita pahami bersama terhadap masing-masing pemeluk diantaranya tipe tertutup dan kaku, dan

yang kedua tipe terbuka dan lentur. Tertutup dan kaku ini levh kepada sifat eksklusivistik. Kemudian, terbuka dan lentur lebih condong pada sifat inklusivistik (Susanto, 2014)

Inklusif ini bisa kita maknai sebagai cara berpikir melalui sikap-sikap yang terbuka melalui penghargaan berbagai perbedaan yang ada. Baik penghargaan dalam berpendapat, gagasan, corak etnis, pandangan kepercayaan dan tradisi serta perbedaan keyakinan dalam beragama (Yaqin, 2005). Masyarakat yang inklusif bisa kita pahami sebagai institusi social yang bisa memahami akan makna keragaman, perbedaan, serta bisa menghargai dan mengakomodir dalam berbagai institusi-institusi didalam tatanan masyarakat. Perbedaan ini bisa kita pahami baik dari keragaman budaya, agama, etnis dan kesukuan, Bahasa, gender serta beragam perbedaan yang lain termasuk dalam perbedaan fisik dan mental (Casram, 2016).

Dalam kontek pemberdayaan masyarakat sikap inklusif sangatlah penting. Luasnya cakupan wilayah pemberdayaan masyarakat dalam aras mikro, mezzo dan makro juga menuntut sikap inklusif ini. Selain itu, dengan pemahaman dan penerapan sikap inklusif tentu berbagai hambatan dalam berinteraksi sebagai proses social dimasyarakat bisa teratasi melalui sikap saling menghormati dan mengakomodasi perbedaan yang ada (Dwiyanto, 2018). Sikap inklusif cenderung melihat perbedaan yang ada secara positif. Sedangkan sikap eksklusif cenderung melihat perbedaan tersebut secara negatif. Sikap ini menciptakan orang-orang yang berjuang bersama untuk mengatasi kesulitan dan mencapai tujuan bersama. Karakter ini juga dapat menciptakan toleransi. Dengan kata lain, mengetahui, memahami, dan menghayati perbedaan kita. Kelengkapan sangat penting untuk negara yang beragam seperti Indonesia.

Filantropi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dikatakan bagian dari modal utama dalam dinamika proses-proses pemberdayaan, hal ini untuk mendorong arah kemandirian itu sendiri. (Hikmat, 2004). Partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat (Umam, 2021). Pemberdayaan masyarakat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk memanfaatkan potensi dan fasilitas yang ada di masyarakat baik lintas lembaga, LSM, dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan menyelesaikan masalah, yang merupakan fasilitas non-pendidikan. Potensi atau partisipasi dalam masyarakat dengan cara mendorong dan memotivasi (meningkatkan kesadaran) potensi yang dimilikinya sehingga dapat membuat perbedaan

dalam masyarakat, baik dalam hal partisipasi maupun dalam hubungannya dengan masyarakat (Fadil, 2013; Hadi, 2010).

Terdapat 4 tingkatan dalam membangun partisipasi masyarakat. Diantaranya yakni pengambilan perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan kgiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, partisipasi dalam pengambilan manfaat (Mardikanto et al., 2013) 4 hal tersebut adalah peluang untuk mendorong partisipasi masyarakat secara maksimal untuk terlibat. Ketika keterlibatan masyarakat tersebut sama-sama memiliki kesadaran dan sikap plural tentu membantu menghilangkan kendala psikis yang disebabkan oleh keberagaman budaya, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, serta termasuk juga didalamnya adalah keberbedaan kemampuan fisik / mental.

Ketiadaan beban psikis ini akan membantu pula dalam proses assessment masyarakat, penggalian potensi masyarakat yang menjadi prinsip pemberdayaan. Prinsip pendekatan pemberdayaan adalah bahwa masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Artinya bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan. Oleh karena itu (Gunawan, 2011; Sumodiningrat, 1999), menegaskan bahwa pembangunan tersebut harus memenuhi dua kriteria yakni *pertama* : keperpihakan dan terarah. Dengan demikian pembangunan tersebut sedemikian rupa dirancang untuk mengatasi masalah mereka dan tentu disesuikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. *Kedua* : adalah keterlibatan maksimal dari masyarakat itu sendiri atau atau bisa diistilahkan dari dan untuk masyarakat itu sendiri. Keterlibatan masyarakat memiliki beberapa tujuan diantaranya, *petama*; mengefektifkan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memfasilitasi identifikasi kemampuan dan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pengalaman tanggung jawab untuk desain, implementasi, pengelolaan, dan upaya untuk meningkatkan diri dan ekonomi mereka. *kedua*, penggunaan pendekatan kelompok. Sulit untuk memecahkan masalah yang dihadapi sendirian. Jika diproses secara individual, cakupan bantuan akan terlalu besar. Pendekatan kelompok ini adalah yang paling efektif dan efisien dalam hal penggunaan sumber daya. (Sumodiningrat, 1999).

Dengan mengedapankan semangat pluralitas dan menitikberatkan keberagaman agama ini akan membantu masyarakat mengikuti program tanpa sekat dan terkota-kotak. Dititik inilah agama bukan sebagai sumber benturan-benturan teologis namun menjadi intrumen sosiologi titik temu persamaan untuk pembangunan manusia kea rah yang lebih

kuat, mandiri dan berkembang. Partisipasi mendorong semua warga negara untuk menggunakan haknya untuk berbicara secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat. Dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, partisipasi masyarakat dapat tercapai. Kepercayaan ini tumbuh ketika masyarakat menerima layanan dan kesempatan yang sama. Perlakuan diskriminatif berbasis bukti dapat menumbuhkan kecemburuan dan mendorong konflik sosial di masyarakat. (Alfi, 2020; Noor, 2011)

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perdebatan mengenai pluralisme agama masih terus berkembang. Hal ini karena disatu sisi, secara teologis agama tidak sama. Di sisi lain, semua agama mengajarkan tentang kebenaran, keselamatan, hidup damai, tolong menolong, dan ajaran kasih sayang antar sesama. Dalam praktik pekerja sosial agama tidak melulu dipandang sebagai doktrin *an-sich*. Namun Agama juga harus dilihat sebagai proses sosial sehingga dapat mengurangi benturan-benturan ideologis sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.

Dalam mencari titik temu keragamaan agama tersebut pekerja sosial hendaknya melihat bahwa keragaman agama adalah aset bangsa. Karena itu harus dirawat dan dilestarikan dalam kerja-kerja kemanusian. Sebagai alternatif saat ini keragaman agama tersebut dapat ditemukan melalui gerakan kedermawanan sosial (filantropi) untuk program-program kemanusiaan. Diperlukan pemberdayaan sosial yang inklusif dan peningkatan partisipasi masyarakat secara berkelanjutian, terarah dan terorganisir. Dengan demikian pemberdayaan inklusif melalui modal pluralism agama dan kedermawanan social dapat mendorong kesejahteraan masyarakat yang lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar, B. (2005). *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ford Foundation.
- Adnan Qohar, H. M. M. (2013). *Nilai Universal Agama-agama di Indonesia Menuju Indonesia Damai*. Kaukaba Dirgantara.
- Akintayo, T., Hämäläinen, J., & Rissanen, S. (2018). Global Standards and the realities of multiculturalism in social work curricula. *International Social Work*, 61(3), 395–409. <https://doi.org/10.1177/0020872816648200>
- Alfi, I. (2020). Strategi Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Era Generasi 4.0.

- MATAN: *Journal of Islam and Muslim Society*, 2.
- Ali, M. (1971). *Religion and Development In Indonesia*. Nida.
- Beratha, N. L. S., Rajeg, I. M., & Sukarini, N. W. (2020). Fungsi dan Makna Simbolis Pohon Beringin dalam Kehidupan Masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 8(2), 33–52.
- Casram, C. (2016). Membangun sikap toleransi beragama dalam masyarakat plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 187–198.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. UGM PRESS.
- Fadil, F. (2013). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 2(2).
- Gunawan, I. (2011). Evaluasi Program Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan*, 17(1).
- Hadi, A. P. (2010). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Halwati, U., Alfi, I., & Arifin, J. (2018). Nasionalisme di Tengah Pluralitas dan Kebebasan Pers. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 12(2), 329–354.
- Hatcher, B. A. (1994). The Cosmos is One Family' (Vasudhaiva Kutumbakam): Problematic Mantra of Hindu Humanism. *Contributions to Indian Sociology*, 28(1), 149–162.
- Hikmat, H. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Humoniora.
- Husaini, A. (2005). *Pluralisme Agama*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Jahidin, A. (2016). *Kesejahteraan Sosial Perjalanan Dialektika Memahami Anatomi Pekerjaan Sosial Profesional* (1st ed.).
- Kahmad, D. (2002). *Sosiologi Agama*. Rosda.
- Knitter, J. (2007). dalam Sapendi "Pendidikan Pluralisme Agama", *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies* (Vol. 2, Issue 2).
- Luluk Fikri Zuhriyah. (2007). Metode Dan Pendekatan Dalam Studi Islam. *Islamica*, 2(1), 27–45.
- Madjid, N. (1995). *Islam Agama dan Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Paramadina.
- Madjid, N. (2000). *Islam Doktrin dan Peradaban* (p. 4). Paramadina,2000.
- Mardikanto, T., T., & Soebianto, P. (2013). *Pengembangan masyarakat*. UNS Press Mardikanto.
- Muhammad, A. S. (2014). PERDEBATAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA AGAMA DAN NEGARA; MENGATASI KONFLIK BERAGAMA DALAM NEGARA BERDASARKAN PEMIKIRAN ISLAM. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(Politik), 1–14.
- MUI. (2005). *Fatwa MUI Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama, from Data Mining Website*.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS*, 1(2/Juli).
- Patty, P. D. A. (2007). *Paradigma Teologi Kristen terhadap Pluralisme Agama*".
- Pedersen, L. (2016). Religious Pluralism in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 17(5), 387–398. <https://doi.org/10.1080/14442213.2016.1218534>
- Puji Purwatiningsih, A., & Hermawan Adinugraha, H. (2018). Histori Filantropi: Tinjauan Teori Postmodern. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 149. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3573>
- Rahman, M. S. (2014). Islam dan pluralisme. *Fikrah*, 2(2).
- Sapendi. (2012). *Pendidikan Pluralisme Agama*", *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies* (Vol. 2, Issue 2).
- Saripudin, U. (2016). Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan*

- Manajemen Islam, 4(2), 165–185.
- Shihab, A. (n.d.-a). *Menyikapi Pluralisme Agama*.
- Shihab, A. (n.d.-b). *Menyikapi Pluralisme Agama*. *Republika, Edisi*.
- Shihab, A. (1999). *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Mizan.
- Siradj, S. A. (2005). Beragama dan Pembelajaran Pluralitas. In *Republika, edisi Seni*.
- Solatun, K. A. (2008). *Sebuah Studi Hermeneutik Dalam buku Metode Penelitian Komunikasi*. Rosda.
- St. Aisyah BM. (2014). Konflik Sosial dalam Hubungan Antar Umat Beragama. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 189–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348>
- Sugiarti, S. (2020). Interaksi Hindu dengan Bugis: Menggali Ajaran Sanatana Dharma dalam Kepercayaan Tolotang. *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya*, 3(2), 131–138.
- Sumbulah, U. (2015). Pluralisme dan Kerukunan Umat Beragama Perspektif Elite Agama di Kota Malang". *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 22(01).
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Gramedia.
- Susanto, E. (2014). Spiritualisasi Pendidikan Agama Islam: Menuju Keberagamaan Inklusif Pluralistik. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 11(2).
- Syamsuddin, A. (2020). KONFLIK SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI AGAMA. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6(1). <https://doi.org/10.35673/ajds.v6i1.865>
- Tamim, I. H. (2011). Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di dalam Komunitas Lokal. *Jurnal Sosiologi Islam*, 1(1).
- Thoha, A. M. (2005). *Tren pluralisme agama: tinjauan kritis*. Gema Insani.
- Umam, K. (2021). REHABILITASI SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT: Sebuah Model Pemberdayaan Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(I), 32–44. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/3189>
- Windati, N. M. S., & Sudarsana, I. K. (2020). Penanaman Sikap Inklusif Keberagamaan Hindu. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 3(1), 94–101.
- Yaqin, M. A. (2005). *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*. Pilar Media.